

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN *MU'NAH RAHN*  
*TASJILY* TANAH**

(Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Wayhalim Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**ZIKRIN JULIAN LESTARI  
NPM.1621030062**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H /2020 M**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun proposal ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan *Mu'nah Rahn Tasjily* Tanah (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. **Tinjauan** adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).<sup>1</sup>
2. **Hukum Islam** dalam pengertian ini adalah hukum ekonomi syariah yaitu hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam harta.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1198.

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 3.

3. **Penetapan** adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya); pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya).<sup>3</sup>
4. **Mu'nah** adalah jasa pemeliharaan atau penjagaan.<sup>4</sup>
5. **Rahn** dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 mendefinisikan *rahn* sebagai berikut: "*Penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan*".<sup>5</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai adalah meminjam uang di batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.<sup>6</sup> Sedangkan *Rahn Tasjily* –disebut dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*–adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*Murtahin*) hanya bukti sah kepemilikan, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*Marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*Rahin*).<sup>7</sup>

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkap secara lebih tajam dan

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* h. 1187.

<sup>4</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014" (On-line), tersedia di: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/> (16 Desember 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 190.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* h. 324.

<sup>7</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 774.

kritis mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan *Mu'nah Rahn Tasjily* Tanah (Studi Pada Pegadaian Syariah Raden Intan Way Halim Bandar Lampung)”.

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Alasan Objektif, persoalan dalam muamalah yang semakin berkembang termasuk pada penetapan *mu'nah rahn tasjily* tanah dengan bentuk persentase. Hal ini dianggap kurang sesuai dengan ketentuan pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah. Sehingga perlu memahami lebih lanjut mengenai penetapan persentase *mu'nah* yang berbeda-beda sesuai dengan jangka waktunya.
2. Alasan Subjektif, ditinjau dari segi bahasan judul proposal ini sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari dalam bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Melakukan akad gadai atau *rahn* merupakan hal yang kerap kali dilakukan oleh sebagian orang yang membutuhkan uang. Menggadaikan barang merupakan salah satu media untuk mendapatkan pinjaman secara cepat dan aman. Masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk membangun suatu usaha tertentu kerap kali memilih untuk menggadaikan barang yang dimilikinya sebagai jalan keluar karena dianggap lebih aman ketimbang harus berutang atau melakukan pinjaman kepada bank.

*Rahn* secara terminologis adalah menjadikan suatu harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dapat dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.<sup>8</sup> *Rahn* berarti menggadaikan barang untuk dijadikan jaminan agar utang atau pinjaman yang diperoleh dapat dikembalikan atau dilunasi. Menurut Ulama Syafi'i, *rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.<sup>9</sup> Terdapat perbedaan antara utang (*qardh*) dengan gadai (*rahn*), *qardh* diperbolehkan memberikan barang jaminan atau tidak memberikan barang jaminan sedangkan *rahn* wajib untuk memberikan barang jaminan, dalam *qardh* tidak boleh ada tambahan dalam pengembaliannya kecuali tambahan tersebut merupakan bentuk rasa terimakasih dan tidak disyaratkan dalam akad sedangkan dalam *rahn* diperbolehkan adanya tambahan atau dapat dikatakan sebagai upah dalam pengembaliannya dan harus diketahui jumlah upah tersebut atau biasa disebut dengan *ujrah*, dalam hal ini *ujrah* masuk ke dalam akad *ijarah*.

Seseorang yang melakukan gadai sebaiknya jangan sampai melalaikan kewajibannya dalam membayar pinjaman atau utang. Hal ini dikarenakan saat seseorang lalai dalam membayar pinjaman atau utang akan membuat orang yang meminjamkan kehilangan kepercayaan dan mengakibatkan barang

---

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 287.

<sup>9</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 90.

gadai tidak dapat kembali kepada *rahn* (orang yang berutang) dikarenakan tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pinjaman atau utang.<sup>10</sup>

Landasan hukum terkait *rahn* berdasarkan Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” (Q.S Al-Baqarah : 283)

Bagi masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat dan aman akan lebih memilih menggunakan akad *rahn*. Dalam akad *rahn* terdapat *mu'nah*. Sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*al- Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*), dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa “dalam hal *rahn* (*dain* atau *marhun bih*) terjadi karena pinjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan atau penjagaan) atas *marhun* (barang jaminan) yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*”.<sup>11</sup> Tetapi pada praktiknya, untuk mempermudah pihak pegadaian syariah dan nasabah maka pegadaian syariah sudah lebih dulu

<sup>10</sup> Darsono, Ali Sakti, Askarya, et. al. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 235.

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014” (On-line), tersedia di: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/> (16 Desember 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

menentukan besaran persentase penetapan biaya *mu'nah* pada *rahn tasjily* tanah. Besaran biaya *mu'nah* tersebut bukan dalam bentuk nominal melainkan dalam bentuk persentase yang berbeda-beda sesuai jangka waktu. Demi mempermudah pihak pegadaian syariah dan nasabah kerap kali terjadi hal-hal yang bersifat kurang efektif atau kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' seperti dalam hal penetapan biaya *mu'nah*. Dalam hal ini *rahn tasjily* merupakan produk yang diambil dari fatwa DSN-MUI kemudian dipakai dan diterapkan di Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung.

Dalam ketentuan pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah di jelaskan bahwa “biaya jasa pada barang simpanan atau barang pemeliharaan harus dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase untuk menghindari riba”.<sup>12</sup> Dari ketentuan ini jelas terlihat bahwa biaya *mu'nah* tidak boleh menggunakan persentase tetapi harus dengan bentuk nominal yang sudah jelas besarannya untuk menghindari adanya riba. Tetapi pada praktiknya besaran biaya *mu'nah* di Pegadaian Syariah Radin Intan ini menggunakan bentuk persentase yang sudah ditentukan oleh pihak pegadaian bukan dalam bentuk nominal yang sudah jelas besarannya. Adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik inilah yang membuat penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Penetapan *mu'nah* dalam bentuk persentase inilah yang menjadi keresahan penulis dan membuat penulis merasa perlu untuk melakukan

---

<sup>12</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 12.

penelitian terkait penetapan persentase *mu'nah* yang berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu pada *rahn tasjily* tanah.

Besaran tarif dan jangka waktu mengenai penetapan persentase *mu'nah* ialah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Besaran Tarif dan Jangka Waktu Penetapan Persentase *Mu'nah***

Pola Angsuran	Tenor (Bulan)	<i>Mu'nah</i> per bulan
Reguler	12,18,24,36,48,60	0,70 % x taksiran
Fleksi (sekali bayar)	3	1,28 % x taksiran
	4	1,29 % x taksiran
	6	1,31 % x taksiran
Berkala per 3 bulan	12,24,36	0,82 % x taksiran
Berkala per 4 bulan	12,24,36	0,88 % x taksiran
Berkala per 6 bulan	12,24,36	1,00 % x taksiran

Contoh penghitungan biaya *mu'nah rahn tasjily* tanah, misal taksiran dari tanah yang digadaikan ialah Rp. 70.000.000, pola angsuran yang digunakan ialah reguler dengan biaya *mu'nah* 0,70%. Maka penghitungan biaya *mu'nah* sebagai berikut  $\text{Rp. } 70.000.000 \times 0,70\% = \text{Rp. } 490.000/\text{bulan}$ . Jadi besar biaya *mu'nah rahn tasjily* tanah yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya ialah sebesar Rp. 490.000/bulan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang penetapan persentase *mu'nah* yang berbeda-beda sesuai



jangka waktu apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Judul proposal ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan *Mu'nah Rahn Tasjily* Tanah (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung).

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ialah area sepesifik yang akan diteliti. Dalam penelitian ini fokus penelitian ialah penetapan persentase *mu'nah* yang berbeda-beda sesuai jangka waktu pada *rahn tasjily* tanah sedangkan dalam ketentuan pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah di jelaskan bahwa “biaya jasa pada barang simpanan atau barang pemeliharaan harus dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase untuk menghindari riba”.<sup>13</sup>

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Penetapan Persentase *Mu'nah Rahn Tasjily* Tanah Berbeda-beda Sesuai Jangka Waktu di Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Penetapan Persentase *Mu'nah* yang Berbeda-beda Sesuai Jangka Waktu di Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung?

#### **F. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Penetapan Persentase *Mu'nah Rahn Tasjily* Tanah Berbeda-beda Sesuai Jangka Waktu di Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

- b. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Penetapan Persentase *Mu'nah* yang Berbeda-beda Sesuai Jangka Waktu di Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini menjadi bagian dari proses pengembangan tradisi keilmuan yang ada dengan cara yang baru dan kreatif.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

#### **H. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). *Field research* pada hakikatnya merupakan riset yang dilakukan dengan mendatangi rumah warga, perusahaan-perusahaan, sawah-sawah dan tempat-tempat lainnya secara langsung dengan mendekati para responden.<sup>14</sup> Dalam hal ini langsung mengamati mengenai penetapan persentase *mu'nah rahn tasjily* tanah di Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan dan memberikan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang akurat

---

<sup>14</sup> J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 28.

dan terpercaya, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini akan di deskriptifkan tentang penetapan persentase *mu'nah rahn tasjily* tanah yang berbeda-beda sesuai jangka waktu di Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung dan mengenai pandangan hukum Islam terkait penetapan persentase *mu'nah rahn tasjily* tanah yang berbeda-beda sesuai jangka waktu pada Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung.

### 3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini pada persoalan penentuan hukum dari penetapan persentase *mu'nah rahn tasjily* tanah yang berbeda-beda sesuai jangka waktu pada Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung saat di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru.<sup>16</sup> Data primer dari penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak di lapangan yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung.

---

<sup>15</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), h. 44.

<sup>16</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dimana data tersebut berasal dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>17</sup> Data dari sumber yang telah ada mengenai penelitian penulis yaitu diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian serta untuk memperkuat penelitian penulis.

## **4. Populasi dan Sample**

### **a. Populasi**

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan, serta keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian.<sup>18</sup> Populasi dari objek penelitian ini adalah pihak Pegadaian Syariah dan Nasabah, populasi nasabah terdiri dari 150 nasabah dan 20 pegawai.

### **b. Sample**

Sample adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.<sup>19</sup> Menurut Suharsimi Arikunto,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 116.

<sup>19</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya...* h. 58.

apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.<sup>20</sup> Sample dari objek dalam penelitian ini adalah  $150 \times 10\% = 15$  sample yang terdiri dari nasabah dan pegawai.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu pendukung untuk mempengaruhi kualitas data hasil penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka akan memengaruhi kualitas data dari hasil penelitian.

Metode pengumpulan data dari penelitian ini yaitu :

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>21</sup> Metode wawancara yang dilakukan oleh penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu pedoman wawancara yang dilakukan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang lebih tentang responden.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

<sup>21</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metodologi Penelitian...* h. 83.

### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen yang berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan data yang diperlukan.<sup>22</sup>

## **6. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara yang sistematis. Metode pengolahan data dilakukan setelah data primer maupun data sekunder terkumpul.

Adapun pengolahan data dari penelitian ini yaitu :

### **a. Editing**

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.<sup>23</sup> Sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

### **b. Sistematika Data**

Sistematika data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasan data yang berdasarkan urutan masalah penelitian.

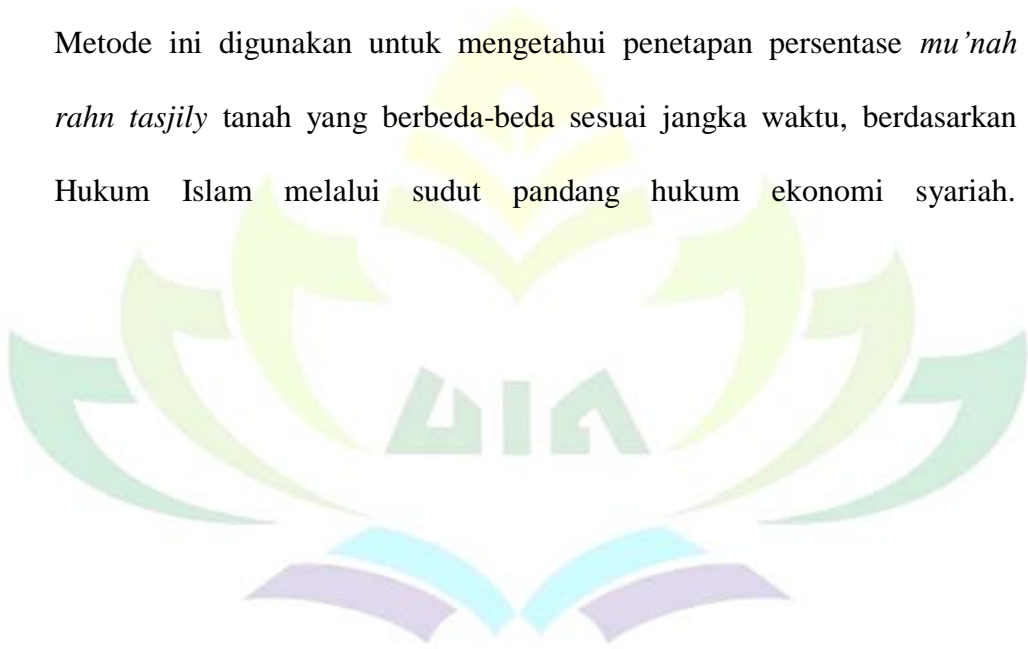
---

<sup>22</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya...* h. 82.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 89.

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data dari penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan metode matematik, dan model statistik melainkan analisis data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu penelitian yang berangkat dari praktik prinsip-prinsip syariah yang khusus di generalisasi untuk ditarik secara umum berdasarkan hukum Islam. Metode ini digunakan untuk mengetahui penetapan persentase *mu'nah rahn tasjily* tanah yang berbeda-beda sesuai jangka waktu, berdasarkan Hukum Islam melalui sudut pandang hukum ekonomi syariah.







## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. KAJIAN TEORI

##### 1. *Rahn Tasjily* Dalam Hukum Islam

###### a. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam, hanya populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia, karena dalam literatur Arab termasuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebenarnya tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Namun, kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah disebut *al-syari'ah al-Islamiyah* (syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (fikih Islam). Oleh karena itu, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian hukum Islam, sebagian ulama mengidentikkan dengan syari'ah dan sebagian ulama yang lain mengidentikkannya dengan fikih.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa istilah hukum Islam hanya terdapat di Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan syariah Islam dan fikih Islam. Dengan ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, sebagian identik dengan syari'ah dan sebagian lainnya identik dengan fikih.

Sebagaimana diketahui, istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamiy*, atau dalam konteks tertentu disebut *al-syari'ah al-islamiy*. Istilah ini dalam literatur Barat

---

<sup>1</sup> Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam". *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.4 No.2 (Desember 2018), h. 105.

dikenal dengan idiom *Islamic Law*, yang secara harfiah diartikan dengan hukum Islam. Penjelasan terhadap kata *Islamic Law*, ditemukan melalui definisi yang lebih padat, yaitu “keseluruhan *khitab* Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dengan segala aspeknya.” Dari definisi ini, terlihat bahwa hukum Islam itu mendekat kepada arti syariat Islam.

Dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak dijumpai. Al-Qur'an maupun Al-Sunnah menggunakan istilah *al-syari'ah*, yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *al-fiqh*. Pada titik inilah kita berpendapat, “hukum Islam adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama, yang berasal dari wahyu Allah, Sunnah Rasul-Nya, dan ijtihad para uliy al-amri.” Wahyu Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an, memuat hukum Islam yang utama (*al-syari'ah*). Kata syari'ah kemudian dijelaskan, diberi contoh, dan dirincikan oleh Rasulullah saw dengan ijtihad-ijtihadnya yang berwujud pada al-Sunnah. Adapun *al-fiqh* adalah proses pemahaman terhadap *al-syari'ah*, yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial masyarakat.<sup>2</sup>

*Fiqh* merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Syariah dalam pengertian hukum *fiqh* terbagi menjadi dua, yaitu *syariahilahi* dan *syariah wadhi'*. *Syariah ilahi* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlangsung dinyatakan secara *eksplisit* dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Norma-norma hukum tersebut berlaku secara universal untuk semua

---

<sup>2</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 6-8.

tempat dan waktu, tidak bisa berubah karena tidak ada kompeten untuk mengubahnya. Di samping itu ada hukum *fiqih* yang tertuang secara *implisit* dalam Al-Qur'an masih memerlukan penjelasan aplikasinya dari Rasulullah SAW, dan disinilah sunnah-sunnah Nabi yang merupakan operasional terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Apabila masalah-masalah sosial kemasyarakatan perlu penjelasannya dilanjutkan melalui pengkajian ijtihad, maka produk pemikiran tersebut dinamakan *fiqih* atau juga disebut *syariah wadhi*'.<sup>3</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>4</sup> Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>5</sup> Para teoritis hukum Islam (ahli-ahli ushul fikih) mendefinisikan "hukum syar'i" secara hampir sepakat sebagai "sapaan ilahi yang ditujukan kepada perbuatan manusia yang berisi preskripsi (perintah dan larangan), alternasi (pemberian pilihan), dan penetapan hubungan". Sapaan ilahi berarti kehendak ilahi yang dikomunikasikan kepada manusia dan yang menghendaki agar tindakan manusia sesuai dengan tuntutan (preskripsi), dan ketetapan hubungan yang termuat dalam sapaan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Akhyar Ari Gayo, "Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisis Atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah". *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 4 No. 3 (Desember 2015), h. 488-489.

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 42.

<sup>5</sup> Ali Imron, "Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5 No.2 (April 2008), h. 123-124.

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vo.50 No.1 (Juni 2016), h. 147.

Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun nash Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal—relevan pada setiap zaman (waktu) dan ruang manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama *universal*, yakni agama yang substansi –substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di manapun, kapanpun, dan berkebangsaan apapun.

Al-Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam, di dalamnya memuat ajaran-ajaran di bidang hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum tata negara, hukum acara, hukum perburuan, hukum ekonomi, hukum sosial, dan hukum internasional. Ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam Al-Qur'an tersebut, dilengkapi dengan Sunnah Rasul, dan dikembangkan dengan ijtihad ulama, keputusan pemerintah, dan ijtihad hakim dalam yurisprudensi.

Al-Qur'an menetapkan bahwa Allah menghendaki setiap muslim melaksanakan hukum-hukum-Nya. Karenanya sudah menjadi keyakinan setiap muslim bahwa jika manusia menjalankan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, akan berakibat kesengsaraan hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti.

Sebagai akibat logis dari sifat keuniversalan hukum Islam adalah ketentuan hukumnya, ada yang ditujukan khusus untuk orang-orang Islam, ada pula yang ditujukan khusus untuk orang-orang non-Islam.

Pengkhususan ini dimaksudkan agar prinsip-prinsip hukum Islam yang ditegakkan, haruslah senantiasa menghargai dan menghormati elemen hukum yang ditegakkan oleh agama Islam lain. Prinsip Islam adalah tidak ada paksaan dalam beragama, serta bagimu agamamu dan bagiku agamaku.<sup>7</sup>

Hukum Islam merupakan hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.<sup>8</sup> Hukum Islam bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat, tidak hanya umat Islam tetapi juga non-Islam. Kemaslahatan yang dimaksud ialah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan dunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan.<sup>9</sup> Karena itu, memahami hukum Islam tidak hanya didasarkan pada makna literalnya saja tapi pengkajian dan pengembangan hukum secara normatif sebagai cara mewujudkan keadilan hukum yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat

---

<sup>7</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 6-8.

<sup>8</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Sultan Agung*, Vol.XLIV No.118 (Agustus 2009), h. 118-119.

<sup>9</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*, Vol.1 No.4 (Desember 2014), h. 352.

penting sebagai wahana pembinaan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia.<sup>10</sup>

b. Pengertian *Rahn*

Kata *rahn* berasal dari Bahasa Arab رهن yang artinya tinggal, menggadaikan, mengutangi, jaminan utang. Menurut Nasrun Haroen *rahn* artinya tetap, kekal dan jaminan. Dalam Islam *rahn* sebagai sarana tolong-menolong tanpa disertai imbalan. Maka secara bahasa telah tergambar arti dari *rahn* adalah hak menahan barang orang lain pada dasarnya tidak diperbolehkan kalau tidak ada *tijarah*, akan tetapi sebagai jaminan utang diperbolehkan.

Pengertian *rahn* secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah adalah: Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut sebagian ataupun seluruhnya.<sup>11</sup>

*Rahn* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* dapat pula diartikan sebagai barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, *rahn*

---

<sup>10</sup> Abd Muin, Ahmad Khotibul Umam, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif". *Jurnal Risalah*, Vol.1 No.1 (Desember 2016), h. 64.

<sup>11</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 89-90.

adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.<sup>12</sup>

Menurut Sayid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, *rahn* ialah menjadi barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan tersebut boleh mengambil utang dan ia dapat mengambil sebagian dari manfaat barang tersebut.

Menurut fatwa DSN-MUI, *rahn* merupakan menahan barang sebagai jaminan utang. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, *rahn* atau gadai ialah penguasaan suatu barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman yang digunakan sebagai jaminan.<sup>13</sup> Dalam hukum positif, pengertian gadai tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya

---

<sup>12</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 774.

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 247.



untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>14</sup>

Dalam fatwa DSN-MUI *Rahn Tasjily* –disebut dengan *Rahn Ta’mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*–adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*Murtahin*) hanya bukti sah kepemilikan, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*Marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*Rahin*).<sup>15</sup>

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan kebendaan atas pembiayaan berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor maupun benda tidak bergerak seperti tanah atau benda bergerak yang dianggap sebagai benda tidak bergerak disebabkan bobotnya yang berat seperti pesawat terbang, yang mana hanya bukti atas hak kepemilikannya saja yang diserahkan kepada kreditur (*murtahin*).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Fiqih Aulya Septi, “Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan”. (Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), h. 16-17.

<sup>15</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*... h. 774

<sup>16</sup> Tri Hidayat, et. al. “Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (*Rahn Tasjily*) Dalam Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia”. *Nurani*, Vol.18 No.1 (Juni 2018), h. 166.



Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur *rahn tasjily* ialah sebagai berikut<sup>17</sup>:

- 1) Objek *rahn* adalah barang, sehingga dapat ditafsirkan sebagai segala jenis barang, tanpa membedakan apakah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanyalah ‘bukti sah kepemilikannya, sedangkan barangnya dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

*Rahn tasjily* dimana benda yang dijadikan jaminan atas utangnya bukan fisik dari benda tersebut, melainkan yang dijadikan jaminan berupa bukti kepemilikannya, konsep ini mirip dengan konsep pemberian jaminan secara fidusa atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Hal ini juga dapat meringankan bagi pihak *rahin* yang masih bisa menikmati benda yang dijadikan sebagai jaminan atas utangnya.<sup>18</sup>

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang beresiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri guna melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan bukan bank tidak

---

<sup>17</sup> Lastuti Abubakar, Tri Handayani, “Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.2 No.1 (September 2017), h. 89.

<sup>18</sup> Muhammad Rizki Kurniawan, “Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung”. (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), h. 25.

mengambil manfaat apa pun terkecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang jaminan atau barang yang digadaikan tersebut.<sup>19</sup>

Benda *rahn* yang digadai dalam konsep fikih merupakan amanat yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik maka diperlukan biaya perawatan, yang dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai ini, para ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang yang dipegang oleh penerima gadai.<sup>20</sup>

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* tersebut ditetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut<sup>21</sup>:

- 1) *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*.
- 2) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan barang ke *murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *mahrnun* dapat dijual paksa atau diesksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.

---

<sup>19</sup> Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persad, 2017), h. 173.

<sup>20</sup> Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia". *Al-Adalah*. Vol.XII No.3 (Juni 2015), h. 499-500.

<sup>21</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 106.

- 3) *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- 4) Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- 5) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*.
- 6) Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
- 7) Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah*.
- 8) Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ  
(رواه ابن ماجه)<sup>22</sup>

Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Punggung dapat ditunggangi bila digadaikan, dan susu perasan dapat diminum bila digadaikan. Dan orang yang menunggang dan meminumnya, dibebankan nafkah." (Shahih. Al Irwa' (1409). Bukhari)

---

<sup>22</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kutubus Sittah Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah*, terjemahan Yoga Permana (Jakarta: Kampung Sunnah, 2008), h. 2470.

c. Dasar Hukum *Rahn*

Terdapat beberapa dasar hukum dari *rahn* di dalam firman Allah SWT diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Ma’idah : 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S Al-Baqarah : 282)

Selain itu di jelaskan juga dalam surat lain mengenai dasar hukum *rahn* ialah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Q.S Al-Baqarah : 283)

Kemudian Rasulullah Saw. menegaskan diperbolehkannya *rahn* ketika Beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَيْلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري)<sup>23</sup>

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A’ masy berkata: kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata: telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari ‘Aisyah radiallahu’anha bahwa: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.”

Dalam kaidah fiqih dijelaskan pula mengenai gadai ialah sebagai berikut:

الْعَيْنُ الْمُسْتَعَارَةُ لِلرَّهْنِ هَلِ الْمُغْلَبُ فِيهَا جَانِبُ الضَّمَانِ أَوْ جَانِبُ الْعَارِيَةِ، قَوْلَانِ

“Barang yang dipinjamkan untuk gadai, apakah yang lebih umum pada barang itu berlaku segi dloman (jaminan) ataukah segi pinjaman”

Ada dua pendapat di antara *furu’* yang berkenaan dengan kaidah ini ialah sesudah barang pinjaman untuk jaminan gadai dipegang oleh pemberi gadai, kebolehan untuk meminta barang kembali bagi orang yang mempunyai barang terdapat dua pendapat, yakni kalau barang tersebut dianggap sebagai barang pinjaman maka boleh atau dapat diminta kembali; tetapi kalau sebagai barang jaminan, tidak dapat diminta kembali. Inilah yang lebih sah. Kalau barang tersebut sebagai pinjaman, maka yang

<sup>23</sup> Abu Ahmad as Sidokare, *Kutubus Sittah Kitab Shahih Bukhari*, (TK: TP, 2009), h. 2336.

mempunyai barang (pemberi pinjaman) disyaratkan mengetahui jenis dan banyaknya hutang. Tetapi kalau sebagai jaminan, maka tidak menjadi syarat.

Bagi pemberi pinjaman barang mempunyai hak untuk memaksa peminjam membatalkan gadainya, dengan ketentuan; kalau barang tersebut dianggap sebagai barang pinjaman, tidak boleh. Tetapi kalau dianggap sebagai barang jaminan, boleh.

Apabila barang rusak ditangan pemberi gadai, maka yang menggadaikan yang harus menanggung, karena sebagai barang pinjaman. Tetapi kalau dianggap sebagai jaminan, maka tidak ada yang harus mengganti barang tersebut, baik yang menggadaikan maupun yang menerima gadai. Berdasarkan dua pendapat ini yang lebih sah adalah yang menggadaikan yang harus menanggung barang rusak tersebut.<sup>24</sup>

Dalam ijma dijelaskan bahwa para ulama sepakat untuk memperbolehkan dilakukannya akad *rahn*. (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181). Berdasarkan kaidah fikih berikut : “Pada dasarnya segala sesuatu bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>25</sup> Serta penjelasan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, terdapat di putusan point f bahwa “besar biaya yang dimaksud huruf e (murtahin dapat

---

<sup>24</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 107-108.

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam...* h. 247.

mengenenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun atau berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad ijarah) tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin”.<sup>26</sup> Selain itu terdapat pula dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, terdapat diputusan ketentuan hukum point 4 bahwa “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”.<sup>27</sup>

d. Macam-Macam *Rahn*

*Rahn* yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas dua macam yaitu<sup>28</sup>:

1) *Rahn Iqar*

*Rahn Iqar*, *rahn rasmi*, *rahn takmini*, *rahn tasjily* merupakan bentuk gadai dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikan. Namun barang tersebut masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi jaminan.

2) *Rahn Hiyazi*

Bentuk *rahn hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda

<sup>26</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008” (On-line), tersedia di: <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/> (16 Maret 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>27</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002” (On-line), tersedia di: <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/> (17 Maret 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>28</sup> Djoko Mulyono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 238-239.



dengan *rahn iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *rahn hiyazi* barang juga berada dalam penguasaan penerima jaminan.

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Barang yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharannya.

- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*



Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

**Menimbang** : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang-



piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;

b. bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk menjadi pedoman.

**Mengingat** : 1. Firman Allah s.w.t.:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...” (Q.S Al-Baqarah: 283)

2. Hadis Nabi s.a.w.,:

Dari ‘Aisyah r.a., berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)<sup>29</sup>

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR al-Bukhari)

3. Ijma’:

Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn* (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

4. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ كَالَّتَابِتِ بِالشَّرْعِ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ selama tidak bertentangan dengan syariat.”

<sup>29</sup> Abu Ahmad as Sidokare, *Kutubus Sittah Kitab Shahih Bukhari...* h. 2336.

**Memperhatikan** : 1. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 28 Shafar 1429 H./06 Maret 2008.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **FATWA TENTANG RAHN TASJILY**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

*Rahn Tasjily* -disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*—adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

**Kedua** : **Ketentuan Khusus**

*Rahn Tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;

- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*;
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil;
- h. Biaya asuransi ***Rahn Tasjily*** ditanggung oleh *Rahin*.

**Ketiga** : Ketentuan umum fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* berlaku pula pada fatwa ini.

**Keempat** : **Ketentuan Penutup**

1. Jika terjadi perselisihan (pertengkar) diantara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.
2. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## 2. Upah Mengupah

### a. Pengertian Upah Mengupah

Dalam sewa-menyewa terdapat *al-Ujr*. *al-Ujr* merupakan imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang yang mengerjakannya.<sup>30</sup>

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“Menjual tenaga atau kekuatan.”<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Al-Adalah*, Vol.XII No.3 (Juni 2015), h. 500.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 114-115.

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah mengupah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>32</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upada adalah uang dan sebagiannya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan pengertian upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>33</sup>

Berkenaan dengan pengupahan kepada tenaga kerja, karyawan/staf, para guru, dosen dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk pembayaran yaitu gaji dan upah. Menurut pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai

---

<sup>32</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015), h. 141.

<sup>33</sup> Budi Solihin, "Pandangan Islam Tentang Penetapan Upah Minimum Regional (UMR)". *Al-Mujadid*, Vol.1 No.01 (Desember 2018), h. 20-21.

imbalan pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti PNS, pegawai pemerintahan, dosen, guru, pegawai swasta, manager dan akuntan. Pembayaran gaji tersebut pada umumnya dilakukan sebulan gaji. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar.<sup>34</sup>

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.<sup>35</sup> Acuan pedoman dalam menentukan upah secara Islami yaitu pengupahan berdasarkan hasil, tidak melihat sisi gender tapi berdasarkan apa yang dikerjakannya, semakin cepat waktunya semakin baik, pekerjaan sama dengan hasil yang sama dibayar dengan bayaran yang sama, dan besaran upah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup sesuai ukuran pada umumnya di masyarakat.<sup>36</sup> Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang

---

<sup>34</sup> Enceng Iip Syaripudin, "Upah Yang Ditanggihkan Dalam Konsep Ekonomi". *Nataras*, Vol.01 No.01 (Agustus 2018), h. 10-11.

<sup>35</sup> Fuad Riyadi, "Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam". *Iqtishadia*, Vol.8 No.1 (Maret 2015), h. 161.

<sup>36</sup> Aprilia Risma Yanti, et. al. "Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid Magelang (Analisis Hukum Islam)". *Al-ahkam*, Vol.4 No.1 (2019), h. 20.

dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan di antara mereka.<sup>37</sup>

Menurut al-Nabhani, upah tidak didasarkan pada kebutuhan hidup. Upah pekerja berdasarkan jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Jika upah telah disebutkan pada saat akad, maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan.<sup>38</sup>

Upah tidak bisa dipisahkan dari sewa menyewa (*ijarah*) karena upah merupakan bagian dari *ijarah*, *ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas suatu manfaat yang diambil.<sup>39</sup> Dalam fikih Islam, *ijarah* yaitu memberikan sesuatu untuk disewakan. *Ijarah* merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dengan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya adalah aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Dalam arti luas, *ijarah*

---

<sup>37</sup> Badrul Munir, Misran, Nurmakrufiana, "Analisis Perbedaan Upah Potongan Padi Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Perspektif *Ujrah Bi Al-'Amal* : Studi Kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar". *Jurista*, Vol.7 No.2 (Desember 2018), h. 238.

<sup>38</sup> M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan". *Al-Adalah*, Vol.14 No.2 (2017), h. 490.

<sup>39</sup> Novi Ayu Lestari, Siti Aisyah, "Upah Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit Dalam Pandangan Islam Studi Kasus Desa Pasar Kembang Kab. Indragiri Hilir". *Jurnal Syari'ah*, Vol.5 No.2 (Oktober 2017), h. 99.



ialah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>40</sup>

Definisi mengenai prinsip *ijarah* juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *ijarah* sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>41</sup>

#### b. Dasar Hukum Upah Mengupah

Terdapat beberapa dasar hukum upah mengupah dalam firman Allah diantaranya ialah sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah : 233)

<sup>40</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 159-160.

<sup>41</sup> Sriono, “Telaah Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa (*Al-Ijarah*) Dalam Perbankan Syariah”. *Advokasi*, Vol.01 No.01 (Maret 2013), h. 90.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ  
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan, rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S az-Zukhruf : 32)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.” (Q.S Ath-Thalaq : 6)

Ayat diatas dapat menjadi dasar hukum adanya sistem upah mengupah dalam Hukum Islam.

Hadis berikut berhubungan dengan upah mengupah, ialah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>42</sup>

Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: “Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering.” Shahih. Al Irwa’ (1498), Al Misykah (2987), At-Ta’liq Ar-Raghib (3/58), Ahadits Al-Buyu’.

<sup>42</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kutubus Sittah Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah...* h.2473.

Kaidah Fikih yang berkaitan dengan upah mengupah ialah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>43</sup>

Berdasarkan kaidah fikih diatas maka hukum dalam bermuamalah adalah dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya serta tidak melanggar syariat-syariat yang telah ditentukan.

Kaidah fikih lainnya ialah sebagai berikut:

أَلَا مُؤَرِّ بِمَقَا صِدِّهَا

“Segala sesuatu(perbuatan) tergantung pada tujuannya”<sup>44</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa, setiap perbuatan dilihat dari niatnya atau tujuannya. Jika niat atau tujuannya baik maka akan baik pula hasilnya, tetapi jika niat atau tujuannya buruk maka akan buruk pula hasilnya.

“Niat baik tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan yang haram”<sup>45</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa, perbuatan halal dan haram dilihat dari segi niat dalam diri seseorang, cara mendapatkan, dan substansinya.

<sup>43</sup> Rosdalina Bukido, Faradila Hasan, “Penerapan Akad *Ijarah* Pada Produk *Rahn* Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado”. *Al-Syir'ah*, Vol.14 No.1 (2016), h. 5-6.

<sup>44</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*... h. 10.

<sup>45</sup> Ma'ruf Amin, *Makharij Fiqhiyyah*, (Banten: STIF Syentra), h. 76.

c. Rukun dan Syarat Upah Mengupah

Terdapat rukun dan syarat dalam hal upah mengupah, antara lain<sup>46</sup>:

- 1) Orang yang memberi upah, dalam hal ini ini disyaratkan baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.
- 2) Orang yang menerima upah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan berakal.
- 3) Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).
- 4) Imbalan sebagai bayaran (upah), dalam hal ini disyaratkan:
  - a) Tidak berkurang nilainya.
  - b) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
  - c) Bisa membawa manfaat yang jelas.
- 5) Akad (ijab kabul), dalam hal ini disyaratkan:
  - a) Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
  - b) Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
  - c) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.

d. Waktu Pembayaran Upah

Dalam Hukum Islam upah yang diberikan kepada pekerja harus memiliki unsur kelayakan, keadilan dan kebajikan. Selain itu dalam akad

---

<sup>46</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis...* h. 142.

antara pengusaha dan pekerja juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syari'at Islam dan batasan upah baik berupa besarnya upah yang diberikan serta harus tepat waktu pemberian upah kepada pekerja.<sup>47</sup> Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.<sup>48</sup> Pemberian upah merupakan hal yang sangat penting dan memberikan arti yang khas dalam suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pemberi kerja dan buruh atau pekerja, karena itulah waktu pemberian upah harus memiliki kejelasan.<sup>49</sup> Dalam hal penetapan upah, peran adat di suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama Imam Mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Septi Wulan Sari, "Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten dan Hukum Ekonomi Islam". *Ahkam*, Vol.4 No.1 (Juli 2016), h. 130.

<sup>48</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis...* h. 143.

<sup>49</sup> Qadariah Barkah, Peny Cahya Azwari, Zuul Fitriani Umari, "Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol.3 No.2 (Juli-Desember 2018), h. 198-199.

<sup>50</sup> Nidaul Wahidah, "Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam". *Maliyah*, Vol.7 No.1 (Juni 2017), h. 5.

Untuk menghindari *riba*, pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah mempunyai ketentuan, yaitu<sup>51</sup>:

- 1) Harus dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.
- 3) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.

Dalam fatwa DSN No: 09/DSN/MUI/IV/2000 perihal Pembiayaan *Ijarah* dinyatakan bahwa kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang *Ijarah* Bagian Keenam Pasal 271 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa: a) Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu dan b) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, dan atau tahun.

Selain itu, pada Pasal 272 dinyatakan bahwa a) Awal tahun *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. b) Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan pada para pihak. Sedangkan dalam Pasal 273 dinyatakan: Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.<sup>52</sup>

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak

---

<sup>51</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional...* h.12.

<sup>52</sup> Harun Santoso, Anik, "Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01 No.02 (Juli 2015), h. 109-110.

ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya *mu'jir* berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, *mu'jir* berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* ialah jika menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarkan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>53</sup>

e. Upah Mengajarkan Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Agama

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa upah mengajar Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan agama hukumnya boleh selama sekedar untuk memenuhi keperluan hidup tanpa dilakukan perjanjian sebelumnya seperti halnya dalam perjanjian bisnis lainnya. Kebolehan upah mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan agama ini dengan alasan bahwa mengajar itu telah menggunakan waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk usaha atau pekerjaan yang lain. Hal ini sebagaimana kata Muhammad Rasyid Ridla, "saya telah mendengar dari syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan : guru-guru yang mendapat gaji dari wakaf hendaklah mereka ambil gaji itu apabila mereka membutuhkan dengan tidak disengaja sebagai upah. Dengan cara demikian selain mereka memperoleh

---

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* h. 121-122.



upah, mereka juga memperoleh pahala dari Allah SWT sebagai penziar agama.”<sup>54</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tentang *Rahn Tasjily*, adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Fiqih Aulya Sepri pada tahun 2019, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul: Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 Dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren, serta kesesuaian syariahnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode *kualitatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *rahn tasjily* dilaksanakan pada Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren pada 2 (dua) macam pembiayaan syariah, yakni Pembiayaan ARRUM BPKB dan Pembiayaan Amanah. Pada kedua pembiayaan tersebut, akad *rahn* yang secara derivatif melahirkan unsur jaminan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari persoalan utang-piutang, yang dalam hal ini didasarkan pada akad *qardh*. Pinjaman (*qardh*) menjadi konsekuensi akibat adanya transaksi gadai. Di samping itu, terdapat sebuah kekeliruan bahwa biaya

---

<sup>54</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis...* h.143.



*mu'nah* dikenakan atas dasar akad *ijarah*. Padahal pendapatan Pegadaian Syariah dalam gadai dengan *rahn tasjily* hanya berasal dari biaya *mu'nah* yang dibayarkan oleh nasabah (*rahin*) sebagai konsekuensi dari akad *rahn*. Adapun kesesuaian syariah pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* dan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*) telah terpenuhi, yakni dengan terlaksana ketentuan-ketentuan dalam kedua fatwa tersebut. Perbedaan antara skripsi Fiqih Aulya Sepri dengan penulis terdapat pada fokus penelitian yakni bagaimana penetapan persentase *mu'nah rahn tasjily* tanah di Pegadaian Syariah Raden Intan Wayhalim Bandar Lampung dan pandangan hukum Islam terhadap penetapan persentase *mu'nah* yang berbeda-beda sesuai jangka waktu.

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Muhammad Rizki Kurniawan pada tahun 2016, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul: Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam produk Amanah pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu *kualitatif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *rahn tasjily* pada pembiayaan Amanah pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan yang telah ditetapkan

oleh PT Pegadaian. Perbedaan antara skripsi Muhammad Rizki Kurniawan dengan penulis terdapat pada fokus penelitian yakni bagaimana penetapan persentase *mu'nah rahn tasjily* tanah di Pegadaian Syariah Raden Intan Wayhalim Bandar Lampung dan pandangan hukum Islam terhadap penetapan persentase *mu'nah* yang berbeda-beda sesuai jangka waktu.

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Ina Hidayatus Sholikhah pada tahun 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul: Akad *Rahn Tasjily* Pada KJKS BMT Al-Hikmah Semesta KCP Tawar Anggota Di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem akad *rahn tasjily* pada KJKS BMT Al-Hikmah Semesta KCP Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan yaitu *kualitatif*. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem akad *rahn tasjily* pada KJKS BMT Al-Hikmah Semesta KCP Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara mempunyai persamaan dan dapat melaksanakan ketentuan fatwa MUI yaitu: a) Barang yang dijadikan sebagai jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. b) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*. Adapun perbedaan dengan Fatwa DSN-MUI adalah *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, apabila terjadi wanprestasi, kebijakan yang diberikan dari pihak BMT adalah

diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan dengan cara menjadwalkan ulang atau memperpanjang waktu (restrukturisasi) dengan ketentuan *ujroh* yang nantinya dibebankan besarnya bisa sama, bisa tambah, bisa berkurang, tergantung kesepakatan. Perbedaan antara skripsi Ina Hidayatus Sholikhah dengan penulis terdapat pada fokus penelitian yakni bagaimana penetapan persentase *mu'nah rahn tasjily* tanah di Pegadaian Syariah Raden Intan Wayhalim Bandar Lampung dan pandangan hukum Islam terhadap penetapan persentase *mu'nah* yang berbeda-beda sesuai jangka waktu.



## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an dan Hadis

Abu Ahmad as Sidokare, *Kutubus Sittah Kitab Shahih Bukhari*, TK: TP, 2009.

Departemen Agama RI, *Al-fatih Al-qur'anul Karim Tafsir Per Kata Tajwid Kode*, Jakarta: Insan Media Pustaka, 2009.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kutubus Sittah Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Kampung Sunnah, 2008.

### Buku Fiqh

Ali , Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Amin, Ma'ruf, *Makharij Fiqhiyyah*, Banten: STIF Syentra.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Darsono, Ali Sakti, Askarya, et. al. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015.

Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

-----, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2013.

Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

Mulyono, Djoko, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi, 2015.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.

### **Buku Penunjang**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Hasan, M Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2015.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

### **Skripsi dan Jurnal**

Abd Muin, Ahmad Khotibul Umam, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif, *Jurnal Risalah*, Vol.1 No.1, Desember 2016.

Abdul Ghofur, Ruslan, Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, *Al-Adalah*, Vol.XII No.3, Juni 2015.

Abubakar, Lastuti dan Tri Handayani, Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.2 No.1, September 2017.

Anwar, Syamsul, Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vo.50 No.1, Juni 2016.

Aprilia Risma Yanti, et. al. Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid Magelang (Analisis Hukum Islam), *Al-ahkam*, Vol.4 No.1, 2019.

Ari Gayo, Akhyar, Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisis Atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah, *Jurnal RechtsVinding*, Vol.4 No.3, Desember 2015.

Aulya Septi, Fiqih, Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan, Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Ayu Lestari, Novi dan Siti Aisyah, Upah Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit Dalam Pandangan Islam Studi Kasus Desa Pasar Kembang Kab. Indragiri Hilir, *Jurnal Syari'ah*, Vol.5 No.2, Oktober 2017.

Barkah, Qadariah, Peny Cahya Azwari dan Zuul Fitriani Umari, Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol.3 No.2, Juli-Desember 2018.

Bukido, Rosdalina dan Faradila Hasan, Penerapan Akad *Ijarah* Pada Produk *Rahn* Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, *Al-Syir'ah*, Vol.14 No.1, 2016.

Gunawan, Hendra, Karakteristik Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.4 No.2, Desember 2018.

Hidayat, Tri, et. al. Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (*Rahn Tasjily*) Dalam Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia, *Nurani*, Vol.18 No.1, Juni 2018.

Iip Syaripudin, Enceng, Upah Yang Ditangguhkan Dalam Konsep Ekonomi, *Nataras*, Vol.01 No.01, Agustus 2018.

Imron, Ali, Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5 No.2, April 2008.

Munir, Badrul, Misran, dan Nurmakrufiana, Analisis Perbedaan Upah Potongan Padi Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Perspektif *Ujrah Bi Al-'Amal* : Studi Kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, *Jurista*, Vol.7 No.2, Desember 2018.



Muzakki, M Harir dan Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Al-Adalah*, Vol.14 No.2, 2017.

Pasaribu, Muksana, Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia*, Vol.1 No.4, Desember 2014.

Riyadi, Fuad, Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam, *Iqtishadia*, Vol.8 No.1, Maret 2015.

Rizki Kurniawan, Muhammad , Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaiaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

Santoso, Harun dan Anik, Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01 No.02, Juli 2015.

Shidiq, Ghofar, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol.XLIV No.118, Agustus 2009.

Solihin, Budi, Pandangan Islam Tentang Penetapan Upah Minimum Regional (UMR), *Al-Mujadid*, Vol.1 No.01, Desember 2018.

Sriono, Telaah Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa (*Al-Ijarah*) Dalam Perbankan Syariah, *Advokasi*, Vol.01 No.01, Maret 2013.

Wahidah, Nidaul, Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam, *Maliyah*, Vol.7 No.1, Juni 2017.

Wulan Sari, Septi, Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten dan Hukum Ekonomi Islam, *Ahkam*, Vol.4 No.1, Juli 2016.

### **Wawancara**

Desma Azizah, wawancara dengan penulis, Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 20 Juni 2020.

Novi Yanti, wawancara dengan penulis, Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 20 Juni 2020.

Marisa Depita, wawancara dengan penulis, Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 22 Juni 2020.

Gunawan, wawancara dengan penulis, Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 20 Juli 2020.

Umi, wawancara dengan penulis, Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 20 Juli 2020.

Didiek Permadi, wawancara dengan penulis, Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 21 Juli 2020.

Dini Asteriana, wawancara dengan penulis, Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 21 Juli 2020.

Evi Napisah, wawancara dengan penulis, Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 21 Juli 2020.

Sari Darti, wawancara dengan penulis, Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 21 Juli 2020.

Suci Auliyani, wawancara dengan penulis, Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 21 Juli 2020.

Desi Ariyani, wawancara dengan penulis, Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 22 Juli 2020.

Indri Mulyani, wawancara dengan penulis, Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 22 Juli 2020.

Oki Hartati, wawancara dengan penulis, Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 22 Juli 2020.

Linda Nurjannah, wawancara dengan penulis, Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 07 Agustus 2020.

Miranti Kusuma Wardah, wawancara dengan penulis, Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung, 07 Agustus 2020.

**Sumber *on-line*.**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014”. (On-line), tersedia di: <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/4/> (16 Desember 2019).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008” (On-line), tersedia di: <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/> (16 Maret 2020).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002” (On-line), tersedia di: <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/> (17 Maret 2020).

